



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

##### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006, tentang "Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan" ;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang " Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ";
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN).
- 5) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang "Pengembangan Telematika di Indonesia"
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
- 7) Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah" ;
- 8) Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang "Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah ";
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 10) Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Prov. Kaltim Tahun 2005 – 2025;
- 11) Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Prov. Kaltim Tahun 2013 – 2018;

## b. Bidang Kerjasama

Koordinasi dengan Instansi Vertikal Bidang Ekonomi  
Tabel III.1

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Penyusunan Revisi Rencana Aksi daerah (RAD) Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Pangan dan Gizi
2	Materi Koordinasi	Koordinasi dan Verifikasi Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan)
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBN : (Kegiatan Dekonsentrasi : Pemantauan rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi) Rp. 55.990.000 APBD : Rp. 33.600.000
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	3 Kali Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pemantauan Intenal
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Tersusunnya Dokumen RAD Pangan dan Gizi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review/penyesuaian RAD PG terhadap RAN PG (rencana aksi nasional dan gizi) 2015-2019 dan renstra SKPD;</li> <li>Evaluasi Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Tahun 2014-2018.</li> </ul>



Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah  
Tabel III.2

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Satuan Kerja Bappeda Provinsi Kaltim Dana Dekonsentrasi urusan pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas
2	Materi Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi penguatan koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional</li> <li>• Fasilitasi koordinasi peningkatan kualitas Musrenbangnas</li> <li>• Fasilitasi kesekretariatan dekonsentrasi TA. 2017</li> </ul>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Bappenas RI
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Dana Dekonsentrasi Bappenas RI, Jumlah Anggaran Rp.840.614.000,-
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	6 Kegiatan
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat koordinasi Perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sarana Prioritas Nasional</li> <li>• Memperkuat koordinasi Perencanaan pusat dan daerah</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintansipkan koordinasi antara anggota satuan kerja Bappeda Provinsi Kaltim</li> <li>• Mengadakan rapat koordinasi antara anggota satuan kerja</li> <li>• Berkoordinasi dengan Inspektorat Utama Kementerian PPN terkait dengan penyesuaian laporan akuntabilitas dan laporan manajerial</li> </ul>

Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan (3)  
Tabel III.3

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Perencanaan dan Identifikasi Daerah tertinggal
2	Materi Koordinasi	Penyusunan RAD Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBD Prov. Kaltim Rp.80.000.000,-
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Kegiatan



6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	✓ Menghasilkan rencana aksi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan ✓ Meningkatkan sinergi antara Kementerian/Lembaga dengan daerah
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

### c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- 1) Tugas kurang diikuti dengan pembiayaan yang cukup, menjadi kendala apalagi transparansi pengelolaan tugas pembantuan cenderung masih didominasi oleh sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor-sektor riil lainnya walaupun secara empirik sektor tersebut telah menjadi urusan dan kewenangan daerah otonom atau kabupaten. Di samping itu, terjadi overlapping bahkan gesekan antara tugas pembantuan dan tugas dan fungsi Dinas atau badan daerah otonom.
- 2) Koordinasi yang kurang antara pemerintah, pemerintah kabupaten/kota dan desa. Menguatnya level pemerintahan baik provinsi, kabupaten/kota maupun desa memiliki independensi yang cukup kuat dan independensi level pemerintahan dapat berintegrasi secara konstruktif dengan jenis kegiatan melalui media koordinasi.
- 3) Sarana dan prasarana dengan alat yang kurang memadai. Aparatur yang mengemban tugas pembantuan cenderung tidak dibekali dengan sarana dan prasarana yang memadai, bahkan jika tidak diserahkan kepada aparatur atau perangkat daerah otonom menjadi simpang siur dan tumpang tindih. Sering terjadi satu kegiatan dibiayai oleh dana dekonsentrasi juga oleh dana rutin daerah otonom. Fenomena tersebut perlu disikapi secara jernih apalagi menyangkut obyek pada level pemerintahan desa yang segalanya masih terbatas.



- 4) Terjadi tugas yang overlapping antara penerima dan pemberi. Apa yang diutamakan tupoksi atau mengikuti selera tugas pembantuan yang cenderung bertolakbelakang.
- 5) Belum sepenuhnya pemahaman SDM terhadap teknologi informasi.

Solusi yang harus dilakukan:

- 1) Melakukan penyusunan anggaran sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- 2) Penjadualan koordinasi kegiatan yang lebih terjadual sehingga target dan realisasi diharapkan bisa terpenuhi.
- 3) Perlunya pengadaan sarana dan prasarana sesuai keperluan daerah dalam rangka mendukung kegiatan pembantuan pemerintah pusat
- 4) Perlunya koordinasi yang lebih intersif antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kebutuhan
- 5) Perlunya dilakukan pelatihan secara periodik dan mendetail bagi pengguna sistem informasi dan mengusulkan tambahan personil SDM yang handal dalam teknologi informasi.



## **BAB IV**

### **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **1. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Prov. Kaltim memiliki peran besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Prov. Kaltim. BAPPEDA juga harus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan arah pembangunan yang kian kompleks.

BAPPEDA Prov. Kaltim memiliki agenda utama yakni menyukseskan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam visi misi RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018. Agenda utama tersebut dilaksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani serta yang diperkirakan akan timbul pada waktu ke depan dimana salah satunya akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis.

Salah satu cara yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi adalah melakukan dengan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi yang layak untuk membantu tugas-tugas yang diberikan oleh BAPPEDA .

Untuk mendukung tupoksi BAPPEDA Prov. Kaltim, pada tahun 2017 dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain:

1. Mendukung Proses Perencanaan:
  - a. Pembuatan Aplikasi Evaluasi Renja
  - b. Pengembangan Aplikasi BridgeSystem - Modul BTL
  - c. Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Lokasi Ibukota Negara di Kaltim
  - d. Pembuatan Animasi Capaian Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi KSP di Kaltim
  - e. Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan SIPPD
  - f. Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan BridgeSystem



2. Mendukung Proses Evaluasi dan Pengendalian:
  - a. Jasa Pemeliharaan Aplikasi TEPPRA Provinsi Kaltim
3. Mendukung Proses Penyediaan Data dan Informasi:
  - a. Pemutakhiran Geospasial one data one map
  - b. Sistem Informasi Data SIDATA Kalimantan Timur
  - c. Perpustakaan Bappeda online
  - d. Pengadaan Videotron

**a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006, tentang "Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan" ;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang " Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ";
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN).
- 5) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang "Pengembangan Telematika di Indonesia"
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
- 7) Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah" ;
- 8) Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang "Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah ";
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 10) Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Prov. Kaltim Tahun 2005 – 2025;
- 11) Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Prov. Kaltim Tahun 2013 – 2018;

#### b. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama dapat dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.1  
Bidang Kerjasama

No.	Pekerjaan	Bidang Kerjasama
1	Pembuatan Aplikasi Evaluasi Renja	Konsutansi Perencanaan
2	Pengembangan Aplikasi BridgeSystem - Modul	Konsutansi Perencanaan
3	Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Lokasi Ibukota Negara di Kaltim	Konsutansi Perencanaan
4	Pembuatan Animasi Capaian Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi KSP di Kaltim	Konsutansi Perencanaan
5	Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan SIPPD	Konsutansi Perencanaan
6	Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan BridgeSystem	Konsutansi Perencanaan
7	Jasa Pemeliharaan Aplikasi TEPPRA Provinsi Kaltim	Konsutansi Perencanaan
8	Pemutakhiran Geospasial one data one map	Konsutansi Perencanaan
9	Sistem Informasi Data SIDATA Kalimantan Timur	Teknologi Informasi
10	Perpustakaan Bappeda online	Teknologi Informasi
11	Pengadaan Videotron	Teknologi Informasi





### c. Nama Kegiatan

Nama Pekerjaan dan Kegiatan dapat dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.2  
Nama Kegiatan

No.	Pekerjaan	Kegiatan
1	Pembuatan Aplikasi Evaluasi Renja	Penyusunan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan
2	Pengembangan Aplikasi BridgeSystem - Modul	Penyusunan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan
3	Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Lokasi Ibukota Negara di Kaltim	Koordinasi Perencanaan pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
4	Pembuatan Animasi Capaian Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi KSP di Kaltim	Koordinasi Perencanaan pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
5	Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan SIPPD	Penyusunan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan
6	Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan BridgeSystem	Penyusunan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan
7	Jasa Pemeliharaan Aplikasi TEPRAPROVINSI Kaltim	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
8	Pemutakhiran Geospasial one data one map	Pengembangan Data dan Informasi Geospasial
9	Sistem Informasi Data SIDATA Kalimantan Timur	Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektor
10	Perpustakaan Bappeda online	Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektor
11	Pengadaan Videotron	Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana



#### d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan Jumlah Anggaran kegiatan kerjasama terinci pada tabel berikut:

Tabel IV.3  
Sumber dan Jumlah Anggaran

No.	Pekerjaan	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	Pembuatan Aplikasi Evaluasi Renja	140,000,000	APBD
2	Pengembangan Aplikasi BridgeSystem - Modul	50,000,000	APBD
3	Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Lokasi Ibukota Negara di Kaltim	1,600,000,000	APBD
4	Pembuatan Animasi Capaian Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi KSP di Kaltim	50,000,000	APBD
5	Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan SIPPD	145,000,000	APBD
6	Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan BridgeSystem	120,000,000	APBD
7	Jasa Pemeliharaan Aplikasi TEPPRA Provinsi Kaltim	50,000,000	APBD
8	Pemutakhiran Geospasial one data one map	35,000,000	APBD
9	Sistem Informasi Data SIDATA Kalimantan Timur	49,000,000	APBD
10	Perpustakaan Bappeda online	49,000,000	APBD
11	Pengadaan Videotron	545,000,000	APBD



### e. Jangka Waktu Kerjasama

Tabel IV.4  
Jangka Waktu Kerjasama

No.	Pekerjaan	Waktu Kerjasama
1	Pembuatan Aplikasi Evaluasi Renja	6 bulan
2	Pengembangan Aplikasi BridgeSystem - Modul	3 bulan
3	Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Lokasi Ibukota Negara di Kaltim	5 bulan
4	Pembuatan Animasi Capaian Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi KSP di Kaltim	3 bulan
5	Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan SIPPD	12 bulan
6	Jasa Lainnya Pendampingan dan Pemeliharaan BridgeSystem	12 bulan
7	Jasa Pemeliharaan Aplikasi TEPRa Provinsi Kaltim	12 bulan
8	Pemutakhiran Geospasial one data one map	2 bulan
9	Sistem Informasi Data SIDATA Kalimantan Timur	5 bulan
10	Perpustakaan Bappeda online	5 bulan
11	Pengadaan Videotron	1 bulan

### f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- Minimnya jumlah dan minat pihak ketiga yang memiliki kompetensi sehingga waktu yang diperlukan untuk pemilihan lebih lama.
- Beragamnya persepsi perencanaan sehingga dalam menentukan arah perencanaan menjadi bias.
- Belum sepenuhnya pemahaman SDM terhadap teknologi informasi.
- Masih diperlukannya personal yang khusus menguasai teknologi informasi.

Solusi yang harus dilakukan:

- a. Melakukan pemilihan di awal tahun anggaran dan lebih memperjelas dan mempertajam KAK pada setiap kegiatan.
- b. Perlunya dilakukan pelatihan secara periodik dan mendetail bagi pengguna sistem informasi.
- c. Perlunya dilakukan koordinasi yang intensif baik dari antar institusi dan pihak pengembang sistem informasi baik di internal maupun di eksternal Prov. Kaltim.
- d. Mengusulkan tambahan personil SDM yang handal dalam teknologi informasi.

## 2. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Koordinasi dengan Instansi Vertikal dirincikan berdasarkan Bidang yang ada di Bappeda Prov. Kaltim dengan rincian:

### a. Bidang Kerjasama

#### 1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel IV.5  
Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi TKPK Prov. Kaltim</li> <li>• Rapat Koordinasi Pencapaian target SDGs</li> </ul>
2	Materi Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi dan perkembangan Jumlah penduduk miskin di Kaltim</li> <li>• Informasi capaian dan tujuan target SDGs</li> </ul>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	BPS, TNP2K, Bappenas, Kemendagri, dan BKKBN
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Rp.433.400.000,-
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan : 1. Penyusunan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);



		2. Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan.
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Informasi tentang data Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial

Tabel IV.6  
Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	
2	Materi Koordinasi	Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Universitas Mulawarman
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBD Prov. Kaltim Rp.202.000.000,-
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Kegiatan (Survei Indeks Persepsi Korupsi Kaltim)
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terukurnya Indeks Persepsi Korupsi Prov. Kaltim Tahun 2017 sesuai dengan Program Pemerintah Provinsi</li> <li>• Diharapkan mampu mengukur tingkat IPK Prov. Kaltim sesuai Tolok Ukur Pelayanan Publik</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dalam mengukur tingkat IPK Prov. Kaltim sesuai Tolok Ukur Pelayanan Publik

## 2) Bidang Prasarana Wilayah

### a. Subbidang Prasarana Perhubungan

Tabel IV.7  
Bidang Prasarana Wilayah (1)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rakortek Pembangunan Antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dilaksanakan tanggal 28 Februari – 3 Maret 2017 di Hotel Gran Clarion, Makassar
2	Materi Koordinasi	Materi Rakortek yaitu sebagai berikut : a. Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP tahun 2018 dan penjabarannya di Daerah



NO	ITEM	DESKRIPSI
		b. Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2018 c. Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Nasional dan Daerah d. Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dalam RKP tahun 2018 e. Penjelasan teknis tentang Rakortek Pembangunan Nasional Antara K/L dan Daerah
3	Instansi Pusat Yang Terlibat	Kementerian Dalam Negeri, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Kementerian Perhubungan
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. RP. ...
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan berupa pembahasan/verifikasi usulan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dipimpin oleh perwakilan Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Bappeda Prov. beserta SKPD terkait Pembahasan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyek K/L yang mendukung prioritas nasional</li> <li>- Proyek Daerah yang mendukung prioritas nasional</li> <li>- Proyek prioritas daerah</li> <li>- Sasaran prioritas pembangunan nasional</li> </ul>
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi perencanaan pembangunan infrastruktur nasional dan daerah serta pembangunan antar daerah tahun 2018.</li> <li>• Penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, dan anggaran pembangunan nasional antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota</li> <li>• Usulan APBN 2018 sesuai dengan kewenangan</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai bahan materi Musrenbang Nasional untuk RKP Tahun 2018</li> <li>• Sebagai bahan sinkronisasi program/kegiatan antara Renja Kementerian /Lembaga dengan Renja SKPD tahun 2018</li> </ul>

Tabel IV.7  
Bidang Prasarana Wilayah (2)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR TA. 2017 dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Maret 2017 di Kupang, Nusa Tenggara Timur
2	Materi Koordinasi	Materi Pra Konreg Kementerian PUPR TA. 2017 yaitu sebagai berikut: 1. Penyampaian Gambaran Umum Kondisi Infrastruktur Ke-PU-an Prov. Kaltim Tahun 2016 2. Identifikasi Isu dan permasalahan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR di Kaltim 3. Penyampaian Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Strategis Provinsi di Kaltim Tahun 2018
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappeda Provinsi dan Dinas PU Provinsi Wilayah Timur
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp .....
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait program/kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasinya isu-isu strategis Bidang PUPR Tahun 2018</li> <li>• Teridentifikasinya rencana aksi dan output pekerjaan strategis dalam RPJMN</li> <li>• Konsolidasi program 2018 antara kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah serta sinkronisasi antar sektor</li> <li>• Inventarisasi kebutuhan infrastruktur di masing-masing WPS (wilayah pengembangan strategis) untuk tahun 2018.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Sebagai bahan Usulan Musrenbang Nasional untuk Rencana Kerja Kementerian PUPR Sebagai bahan sinkronisasi program/kegiatan antara Renja Kementerian PUPR dengan Renja SKPD



Tabel IV.8  
Bidang Prasarana Wilayah (3)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Sosialisasi dan Pelatihan E-Planning DAK dilaksanakan di Bappenas tanggal 16-19 April 2017
2	Materi Koordinasi	Materi Rapat yaitu sebagai berikut: 1. Sosialisasi Aplikasi Perencanaan pembangunan berbasis perencanaan elektronik (e-planning) untuk integrasi pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Daerah. 2. Pelatihan Aplikasi Perencanaan pembangunan berbasis perencanaan elektronik (e-planning) untuk DAK Daerah
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Bappeda Provinsi dan Kab/Kota Wilayah Timur.
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp .....
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi Perencanaan pembangunan berbasis perencanaan elektronik (e-planning) untuk pengusulan kegiatan DAK</li> <li>Mekanisme DAK Fisik Tahun 2018</li> </ul>
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersosialisasinya Aplikasi Perencanaan pembangunan berbasis perencanaan elektronik (e-planning) untuk integrasi pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Daerah.</li> <li>Peningkatan Kapasitas SDM/Operator DAK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan kegiatan sumber dana DAK.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Daerah melakukan Input usulan DAK tahun 2018 melalui sistem e-planning</li> <li>Hasil Input menjadi bahan sinkronisasi program/kegiatan antara Renja Kementerian Bidang Infrastruktur dengan Renja SKPD tahun 2016</li> </ul>





Tabel IV.9  
Bidang Prasarana Wilayah (4)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Forum Diskusi Tindak Lanjut Pengisian e-planning DAK 2018, dilaksanakan tanggal 17 Mei 2017 di Kementerian Bappenas Jakarta
2	Materi Koordinasi	Materi Diskusi yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progress Pengusulan Kegiatan DAK melalui Aplikasi e-planning DAK</li> <li>2. Pengarahan dalam Penggunaan Aplikasi e-planning DAK</li> <li>3. Pemanfaatan Data Usulan dalam e-planning DAK untuk Pengalokasian DAK 2018</li> <li>4. Percepatan dalam Pengusulan Kegiatan DAK Tahun 2018</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Bappenas dan Kementerian PUPR
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Kaltim dalam pengisian e-planning DAK Fisik tahun 2018
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong agar adanya perbaikan dalam penerapan dan pengisian aplikasi e-planning DAK.</li> <li>• Memperkuat sinergitas informasi dan kerjasama antar stakeholder dalam upaya percepatan pengusulan kegiatan DAK Fisik 2018.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Aplikasi e-planning DAK Pusat akan memetakan kembali hasil usulan DAK yang mengalami kendala.</li> <li>• Bappeda Provinsi sebagai tim verifikasi menunggu perbaikan hasil input kewenangan sebelum di verifikasi ulang.</li> </ul>



Tabel IV.10  
Bidang Prasarana Wilayah (5)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi DAK Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juli 2017 di Bappenas
2	Materi Koordinasi	Evaluasi hasil capaian DAK Fisik Bidang Infrastruktur
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Bappenas dan Kementerian PUPR
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Hasil Capaian DAK Bidang Infrastruktur TA. 2015-2017</li> <li>• Permasalahan Pelaksanaan DAK</li> <li>• Rencana Kerja Tim Koordinasi</li> <li>• Sukses story DAK</li> <li>• Upaya Percepatan DAK upaya percepatan pelaksanaan DAK Tahun 2017</li> </ul>
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Memperkuat sinergitas informasi dan kerjasama antar stakeholder dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui dana DAK
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Daerah diharapkan tertib dalam pelaporan DAK sesuai dengan Peraturan yang berlaku</li> <li>• Pelaksanaan DAK tahun berjalan sebagai bahan/input untuk usulan tahun berikutnya.</li> </ul>

Tabel IV.11  
Bidang Prasarana Wilayah (6)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik 2018 dilaksanakan pada tanggal 24-25 Agustus 2017 di HARRIS Hotel dan Conventions Jawa Barat.
2	Materi Koordinasi	Materi Forum Sinkronisasi terkait : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Penilaian dan pengalokasian DAK Fisik Tahun 2018 dan</li> <li>• pembahasan hasil input konfirmasi Pemda, melalui aplikasi e-sinkrondakfisik</li> </ul>



3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Keuangan, kementerian Bappenas, Kementerian PUPR, Serta Kementerian/Lembaga di sektor lainnya.
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp. ....
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait hasil input konfirmasi Pemda terhadap hasil penilaian DAK Fisik Pemerintah Pusat yaitu berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfirmasi kesiapan daerah</li> <li>• Kesepakatan menu kegiatan, target output, target pencapaian perbaikan pelayanan publik di daerah, lokasi kegiatan, dan prioritas kegiatan dan lokasi</li> <li>• Konfirmasi kesesuaian data teknis &amp; Data Pendukung</li> <li>• Pembahasan mencakup DAK Reguler, Afiriasi dan Penugasan</li> </ul>
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi perencanaan pembangunan infrastruktur DAK Fisik 2018.</li> <li>• Penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, dan anggaran pembangunan nasional antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Hasil Pembahasan akan digunakan sebagai : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghitungan alokasi sementara DAK/bidang/daerah;</li> <li>• Penghitungan pagu DAK per jenis dan per bidang untuk bahan Pembahasan TKDD dengan DPR RI;</li> <li>• Finalisasi Juknis DAK oleh K/L, untuk selanjutnya disampaikan ke DJPK guna penyusunan Ranperpres Juknis DAK; Penyiapan Rancangan Penetapan nama kegiatan, target output, satuan biaya, dan lokasi kegiatan</li> </ul>

Tabel IV.11  
Bidang Prasarana Wilayah (7)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Focuss Grup Disucussion (FGD) 5 Pilar Keselamatan Lalu Lintas dilaksanakan pada tanggal 25-26 Oktober 2017 di Hotel Bena Kutai Balikpapan
2	Materi Koordinasi	Materi FGD yaitu sebagai berikut:



NO	ITEM	DESKRIPSI
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Aksi Manajemen Keselamatan Jalan oleh Bappenas</li> <li>2. Implementasi Kendaraan Yang Berkeselamatan Oleh Kemehub</li> <li>3. Rencana Aksi Keselamatan Jalan Bidang Kesehatan oleh Kemenkes</li> <li>4. Rencana Umum Nasional Keselamatan (Runk) Jalan 2011 – 2035 oleh Kemen PUPR</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Bappenas, KemenPUPR, Kemenhub, Kemenkes, POLDA Kaltim, Korlantas Pusat
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait Kebijakan keselamatan jalan di Kaltim dan Kaltara dalam melaksanakan RUNK 2011-2035 sesuai Inpres No. 4 Tahun 2013
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Tersusunnya Rencana Aksi Keselamatan Jalan Tahun 2018-2020 untuk mengoptimalkan kerjasama penjabaran Tahun Keselamatan untuk wilayah Kaltim dan Kaltara
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam penanganan keselamatan jalan melalui 5 pilar keselamatan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Aksi oleh Tiap Pilar dan Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dari Program dan Rencana Aksi tiap Pilar RUNK di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah</li> <li>• Kementerian/Lembaga perlu meningkatkan pelaksanaan forum lalu lintas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah meliputi propinsi, kabupaten, maupun kota.</li> <li>• Perlu adanya bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah seperti bantuan teknis, pilot project, dan pendampingan program keselamatan jalan yang terkoordinasi sesuai fungsi masing-masing Pilar Keselamatan</li> <li>• Penanganan Pasca Kecelakaan melalui percepatan pembentukan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Di Setiap Kabupaten/Kota</li> </ul>



NO	ITEM	DESKRIPSI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu digalakan upaya upaya menarik pihak swasta yang tertarik dengan keselamatan untuk berkontribusi baik dari aspek pembiayaan maupun sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>• Mendorong Kemendikbud untuk mempercepat modul pendidikan keselamatan jalan dalam kurikulum pendidikan di setiap jenjang sekolah bahkan pada usia dini</li> <li>• Penanganan kelebihan muatan (over loading) kendaraan dan peningkatan standar kelayakan kendaraan bermotor sebagai kendaraan yang berkeselamatan</li> <li>• Dukungan pendanaan dalam rangka implementasi pelaksanaan Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.</li> </ul>

Tabel IV.12  
Bidang Prasarana Wilayah (8)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Sosialisasi Petunjuk Operasional dan Konsultasi Penyelenggaraan DAK Infrastruktr 2018
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Umum Penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur 2018</li> <li>2. Kebijakan Pengalokasian dan Transfer ke Daerah</li> <li>3. Pengelolaan dan Pengendalian Keuangan DAK</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Bappeda Se Indonesia
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait petunjuk operasional pelaksanaan DAK Infrastruktur Tahun 2018
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Tersosialisasinya Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktr 2018
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai bahan finalisasi Penghitungan alokasi DAK/bidang/daerah</li> </ul>



NO	ITEM	DESKRIPSI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan DAK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan DAK.</li> </ul>

Tabel IV.13  
Bidang Prasarana Wilayah (9)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
2	Materi Koordinasi	<p>Materi Rakor yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisai terkait Penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)</li> <li>Identifikasi kegiatan prioritas daerah yang dibutuhkan dalam kegiatan RP2IJM</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Bappenas, Kementerian PUPR, kemneterian Perhubungan, Bappeda Se Indonesia
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait Program Prioritas yang diusulkan untuk didanai APBN
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersosialisasinya Penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)</li> <li>Memperkuat sinergitas informasi dan kerjasama antar stakeholder dalam upaya percepatan pembangunan investasi infrastruktur di Kawasan Kalimantan Timur</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Pemerintah Provinsi memfasilitasi koordinasi pembahasan kegiatan RP2IJM dengan Kab/Kota Pemerintah Provinsi dan Kab Kota mengidentifikasi kegiatan sebagai bahan usulan untuk RP2IJM yang disesuaikan dengan RPJM dan RPJMD



Tabel IV.14  
Bidang Prasarana Wilayah (10)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Koordinasi Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 Februari 2017 di Kota Balikpapan.
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan Tiga Institusi di Kaltim dalam pembebasan lahan jalan tol Balikpapan – Samarinda.</li> <li>2. Penjelasan terkait progres pembangunan jalan tol.</li> <li>3. Identifikasi permasalahan dan kendala dalam pembebasan lahan milik PT. Samarinda Golden Prima dan lahan tanam tumbuh milik warga.</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Kodam VI / Mulawarman
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber dana APBD Provinsi dengan jumlah anggaran Rp. ....
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan pembangunan jalan tol yang dikoordinasikan menyangkut kendala dan permasalahan pembebasan lahan yang masih belum tuntas diatas trase jalan tol.
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasinya permasalahan lahan yang menjadi kendala Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda.</li> <li>• Mengetahui secara langsung kemajuan pekerjaan serta kendala yang dihadapi di lapangan.</li> <li>• Sinkronisasi rencana kerja antar instansi yang terlibat.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai bahan laporan kepada pimpinan.</li> <li>• Mengidentifikasi kepemilikan lahan yang dianggap belum tuntas penyelesaiannya agar segera dapat ditindak lanjuti.</li> </ul>

Tabel IV.15  
Bidang Prasarana Wilayah (11)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Penyelesaian Konektivitas Jembatan Pulau Balang ke Sistem Jaringan Jalan Trans Kalimantan, dilaksanakan pada tanggal 02 –



NO	ITEM	DESKRIPSI
		03 Maret 2017 di Ruang Rapat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan.
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi permasalahan lahan yang belum bebas di Pulau Balang.</li> <li>2. Rencana penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian jalan penghubung Pulau Balang.</li> <li>3. Pengembangan kawasan yang memerlukan konektivitas jalan Trans Kalimantan melalui Jembatan Pulau Balang.</li> <li>4. Penjelasan progres kegiatan yang dikerjakan oleh Pemprov Kaltim untuk menunjang Jembatan Pulau Balang.</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian PUPR, Asisten II Sekprov Kaltim, Satker P2JN, Satker Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pulau Balang, Dinas PU Kota Balikpapan dan Dinas PU Kab. PPU.
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber dana APBD Provinsi dengan jumlah anggaran Rp. ....
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Pembangunan Jalan Akses Pulau Balang sebagai bagian jalan Lintas Kalimantan.
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasinya informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur.</li> <li>• Sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</li> <li>• Masih terdapat permasalahan lahan yang belum bebas di Pulau Balang untuk Jalan Akses sepanjang 1,78 km.</li> <li>• Rencana penyelesaian serta permasalahan yang dihadapi disampaikan secara bersamaan oleh pihak Pemprov Kaltim, Pemkab PPU dan Pemkot Balikpapan.</li> <li>• Jembatan Pulau Balang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan 2 (dua) kawasan industri Kariangau di sisi Balikpapan dan Buluminung di sisi Kab. PPU.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai bahan dalam mengidentifikasi kepemilikan lahan yang dianggap belum tuntas penyelesaiannya.</li> </ul>





NO	ITEM	DESKRIPSI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Provinsi mengusulkan agar untuk DAK Penugasan ditambah kriteria selain untuk mendukung prioritas nasional, juga untuk mendukung proyek strategis nasional.</li> <li>Akan dilakukan konsinyering bersama antara pihak BPJN XII-Balikpapan, Pemprov Kaltim, Pemkab PPU, dan Pemkot Balikpapan untuk membahas solusi secara teknis agar Jembatan Pulau Balang dapat terkoneksi dengan jalan akses.</li> </ul>

Tabel IV.16  
Bidang Prasarana Wilayah (12)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Penyelenggaraan Perkeretaapian PT. Kereta Api Borneo di Kalimantan Timur, dilaksanakan pada hari Senin 11 September 2017 bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta.
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan Kementerian Perhubungan dan KPPIP terkait pengembangan peruntukan fungsi kereta api khusus batu bara menjadi perkeretaapian umum.</li> <li>Penjelasan PT. KAB terkait kendala dan permasalahan perkeretaapian umum.</li> <li>Sosialisasi Perpres No. 44 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri No. 45 Tahun 2015.</li> <li>Jaminan dukungan Pemerintah untuk percepatan proses perizinan terhadap Proyek Strategis Nasional.</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Koordinator, KPPIP, BKPM Pusat, Kementerian Perhubungan, Bappeda Prov. Kaltim, Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, PT. Kereta Api Borneo.
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber dana APBD Provinsi dengan jumlah anggaran Rp. ....
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan berupa program/kegiatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian PT. Kereta Api Borneo.
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil audiensi dengan Kementerian Perhubungan dan KPPIP tanggal</li> </ul>



NO	ITEM	DESKRIPSI
		<p>27 Oktober 2016 dan 15 Desember 2016, disarankan untuk mengembangkan proyek dengan skema perkeretaapian umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasi informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul selama pembangunan kereta api di Kaltim.</li> <li>• Tersosialisasinya Perpres No. 44 Tahun 2016 dan PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Usaha di Bidang Transportasi.</li> <li>• Tersosialisasinya PMK 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan akan mendapatkan fasilitas perizinan 3 jam dari BKPM.</li> <li>• Sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai bahan dalam mengidentifikasi permasalahan di lapangan.</li> <li>• PT. KAB perlu menyusun business plan penyelenggaraan perkeretaapian umum di Kaltim.</li> <li>• PT. KAB berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim terkait masa konsesi.</li> <li>• PT. KAB dalam waktu 3 – 6 Bulan akan menyelesaikan Outline Business Case ( OBC ) / Pre Fisibility Study dan melaporkan kepada Kementerian Perhubungan dan Pemprov Kaltim.</li> </ul>

Tabel IV.17  
Bidang Prasarana Wilayah (13)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Terbatas antara Presiden Republik Indonesia, Kabinet Kerja Jilid II dan Gubernur Kalimantan Timur, dilaksanakan pada hari Senin 09 Maret 2017 bertempat di Istana Negara Jakarta.



NO	ITEM	DESKRIPSI
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi permasalahan dan kendala proyek strategis nasional di Kaltim.</li> <li>2. Pelaporan progress perkembangan proyek strategis nasional di Kaltim.</li> <li>3. Pencarian solusi dari setiap permasalahan sebagai upaya penuntasan proyek strategis nasional di Kaltim.</li> <li>4. Penyampaian usulan 9 proyek baru sebagai Proyek Strategis Nasional.</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Pusat, Gubernur Kaltim, dan Pemerintah Daerah.
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber dana APBD Provinsi dengan jumlah anggaran Rp. ....
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan berupa sinkronisasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur yang mendukung Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemprov Kaltim menyampaikan usulan 9 proyek baru sebagai Proyek Strategis Nasional.</li> <li>• Usulan baru 9 proyek strategis nasional disampaikan dalam bentuk matrik kertas kerja sebagai laporan.</li> <li>• Penyelarasan program/kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</li> <li>• Penyelesaian permasalahan melalui Kebijakan Presiden RI yang tidak dapat diselesaikan Gubernur Kaltim karena keterbatasan Kewenangan.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai bahan usulan untuk masing – masing Kementerian dalam menyelesaikan permasalahan.</li> <li>• Sebagai bahan sinkronisasi dan penyelarasan program/kegiatan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</li> </ul>

Tabel IV.18  
Bidang Prasarana Wilayah (14)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Jembatan Tol Teluk Balikpapan, dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Hotel Royal Suite Balikpapan.
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Business Plan dan Konsep Penyertaan modal Pembangunan Jembatan Tol.</li> <li>2. Penyampaian data teknis terkait data lalu lintas harian (LHR) dan data permodelan makro transportasi.</li> <li>3. Pelaporan progress akhir rencana Pembangunan Jembatan Tol.</li> <li>4. Penjelasan tentang sharing pendanaan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan PT. Waskita Karya.</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Gubernur Kaltim, Kementerian PUPR, Bappeda Kaltim, Dinas PU Kaltim, Bappeda Kota Balikpapan, Dinas PU Kota Balikpapan, Bappeda Kab. PPU, Dinas PU Kab. PPU dan PT. Waskita Karya
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber dana APBD Provinsi dengan jumlah anggaran Rp. ....
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan berupa pemaparan perkembangan pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan yang disampaikan oleh PT. Waskita Karya.
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasinya permasalahan berupa perubahan konstruksi yang menyebabkan perubahan terhadap kebutuhan anggaran.</li> <li>• Mendapatkan data valid terkait lalu lintas harian serta permodelan makro transportasi.</li> <li>• Memperoleh gambaran waktu penyelesaian pembangunan jembatan tol.</li> <li>• Memperoleh gambaran pembagian komposisi penyertaan modal berdasarkan perhitungan oleh BUJT.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai bahan laporan kepada pimpinan.</li> <li>• Sebagai bahan pertimbangan terkait investasi penyertaan modal Pemprov Kaltim.</li> </ul>



NO	ITEM	DESKRIPSI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pihak konsultan akan mereview design jembatan tol untuk menurunkan biaya konstruksi.</li> </ul>

Tabel IV.19  
Bidang Prasarana Wilayah (15)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Teknis Forum Kerjasama Dan Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) Tahun 2017, dilaksanakan pada tanggal 08 – 09 November 2017 di Hotel Crown Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi serta klarifikasi masing – masing daerah terkait dengan lokasi kegiatan.</li> <li>Penyesuaian lokasi usulan kegiatan didukung dengan titik koordinat dan peta.</li> <li>Diskusi kendala dan permasalahan yang dihadapi masing – masing daerah.</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian PUPR, Bappeda Katim, Bappeda Kaltara, Bappeda Kalbar, Bappeda Kalteng dan Bappeda Kalsel.
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber dana APBD Provinsi dengan jumlah anggaran Rp. ....
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan berupa sinkronisasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur di dalam mendukung Konektivitas, SDA dan Kelistrikan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teridentifikasinya lokasi dan permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah.</li> <li>Harmonisasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan Renja K/L.</li> <li>Sinkronisasi terhadap program/kegiatan konektivitas antar Provinsi.</li> <li>Sebagai bahan usulan program/kegiatan ke pemerintah pusat.</li> </ul>



NO	ITEM	DESKRIPSI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperoleh titik koordinat lokasi usulan pembangunan infrastruktur di Regional Kalimantan.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pembahasan tertuang dalam bentuk berita acara, yang selanjutnya akan dijadikan dokumen acuan pembangunan program prioritas.</li> <li>Hasil pembahasan menjadi bahan evaluasi program/kegiatan masing – masing daerah.</li> <li>Dengan adanya titik koordinat di setiap usulan program/kegiatan, akan dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.</li> <li>Usulan program/kegiatan Regional sebagai bahan dalam Musrenbangnas.</li> </ul>

#### b. Subbid Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang

Tabel IV.20  
Bidang Prasarana Wilayah (1)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rakortek SDA se-Kalimantan Timur Tahun 2017
2	Materi Koordinasi	f. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air g. Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Rawa h. Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air i. Pengelolaan Aset Daerah j. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air k. Pengendalian Banjir Kota Balikpapan
3	Instansi Pusat Yang Terlibat	1. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 2. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR 3. Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait sinkronisasi program/kegiatan pembangunan prasarana SDA di Provinsi Kalimantan Timur



NO	ITEM	DESKRIPSI
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah terhadap Program/Kegiatan Bidang Sumber Daya Air</li> <li>• 5 pilar utama dalam pembangunan dan pengembangan Daerah Irigasi yakni Ketersediaan Air, Infrastruktur, Manajemen Pengelolaan, Institusi, dan Sumber Daya Manusia.</li> <li>• Keandalan irigasi di Indonesia masih tergolong rendah. Saat ini hanya 10,7% saja areal persawahan yang dilayani secara teknis maupun semi teknis, sisanya 89,3% dilayani oleh sumber air permukaan.</li> <li>• Secara nasional. Terdapat 46% prasarana irigasi dalam kondisi rusak dimana 83,7% diantaranya merupakan irigasi kewenangan provinsi dan kabupaten.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan SDA di Kalimantan Timur melalui koordinasi aktif dan intensif antar instansi dan antar tingkat pemerintahan.</li> <li>• Hingga akhir Tahun 2022, diharapkan layanan irigasi premium meningkat. Di Kalimantan Timur dapat tuntas terbangun 1 bendungan (Bendungan Lambakan dengan layanan 18.500 Ha) dan 5 Daerah Irigasi.</li> </ul>

Tabel IV.21  
Bidang Prasarana Wilayah (2)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	FGD Dukungan Teknis Penetapan Skenario Ekonomi Pola WS Berau Kelai
2	Materi Koordinasi	Paparan & Diskusi Pola WS Berau Kelai
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	BWS Kalimantan III, Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait skenario ekonomi yang digunakan dalam pola wilayah sungai
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan pola pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berau Kelai disepakati Skenario Ekonomi Tinggi</li> </ul>

NO	ITEM	DESKRIPSI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Bappeda Kalimantan Utara akan menyampaikan hasil pembahasan FGD ini kepada Gubernur untuk selanjutnya dibuatkan surat rekomendasi Gubernur yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dengan kesepakatan draft/rancangan pola PSDA WS Berau Kelai dinilai layak dan ditindaklanjuti ke tahap penetapan oleh Menteri PUPR dengan memperhatikan saran masukan perbaikan pada matrik yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pola WS Berau Kelai</li> <li>FGD terfokus membahas 5 aspek detail dalam pola WS Berau Kelai, yakni aspek konservasi sumber daya air, aspek pendayagunaan sumber daya air, aspek pengendalian daya rusak air, aspek sistem informasi sumber daya air, dan aspek pemberdayaan dan pengawasan</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>BWS Kalimantan III selaku penyusun pola pengelolaan SDA WS Berau Kelai perlu melengkapi dan atau memperbaiki dokumen selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2017</li> </ul>

Tabel IV.22  
Bidang Prasarana Wilayah (3)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Dukungan Teknis Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Pemprov dan Pemkab
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Pola Pengelolaan SDA</li> <li>Kebijakan/Peraturan tentang Pengelolaan SDA</li> <li>Peluang dan Tantangan SDA baik Rencana maupun Implementasi</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	BWS Kalimantan III, Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan berupa dukungan teknis kerjasama dalam pengelolaan SDA



NO	ITEM	DESKRIPSI
		dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama antar tingkat Pemerintahan dan antar sektor dalam upaya pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>Beberapa tantangan utama dalam upaya pengelolaan sumber daya air antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>Fenomena <i>climate change</i> yang menyebabkan beberapa aspek tidak sesuai prediksi, seperti suhu dan cuaca</li> <li>Kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga teknis pengelola sumber daya air belum memadai</li> <li>Belum tersedianya data dan informasi yang mencukupi untuk menyusun perencanaan</li> <li>Dana yang tersedia sangat terbatas</li> <li>Anggaran untuk operasi dan pemeliharaan sangat minim sehingga beberapa prasarana irigasi yang telah terbangun tidak terawat dan tidak berfungsi optimal</li> </ul> </li> <li>Kabupaten/kota memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Untuk itu, diharapkan dapat mendukung dan berperan aktif mensukseskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Sumber Daya Air bersifat lintas wilayah administrasi, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar tingkat pemerintahan agar Potensi Sumber Daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.</li> </ul>

Tabel IV.23  
Bidang Prasarana Wilayah (4)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Tindaklanjut Pembahasan Penyelesaian Kendala Pembangunan Bendungan Marangkayu
2	Materi Koordinasi	Kendala Pembangunan Bendungan Marangkayu
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>Kementerian PPN/Bappenas</li> </ol>



NO	ITEM	DESKRIPSI
		3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Kementerian Dalam Negeri 7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 8. SKK Migas 9. BUMN
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait penyelesaian kendala pembangunan Bendungan Marangkayu
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemkab Kukar pada tahun 2017 akan menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah. Berdasarkan dokumen ini Bupati Kutai Kartanegara menetapkan Penetapan Lokasi baru seluas 544 Ha</li> <li>Untuk relokasi 92 KK penduduk yang terkenda dampak genangan, sesuai surat Asisten Bidang Pemerintahan &amp; Kesra Setda. Kab. Kukar penyelesaiannya melalui program transmigrasi swakarsa mandiri</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian PUPR perlu membuat surat kepada Kementerian BUMN &amp; Kementerian Keuangan untuk memohon pengalihan pemanfaatan aset PTPN XIII seluas 196,12 Ha adri perkebunan menjadi areal genangan Waduk Marangkayu</li> <li>Dinas PUPR Prov. Kalimantan Timur membuat surat kepada BPN perihal permohonan untuk peninjauan kembali HGU PT. Kutai Sawit Plantation seluas ± 24 Ha yang terkena genangan Waduk Marangkayu</li> <li>Dinas PUPR Prov. Kalimantan Timur membuat kronologis perubahan luas area Bendungan Marangkayu dari 350 Ha menjadi 615 Ha</li> <li>Pemkab. Kukar perlu melakukan kajian &amp; dikoordinasikan dengan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi</li> <li>SKK Migas &amp; PT. VICO diminta bukan hanya membuat DED proteksi sumur migas tetapi juga membangun proteksi sumur migas</li> <li>Pemprov Kaltim diminta untuk menuntaskan sisa pembangunan fisik bendungan berupa Rip Rap</li> </ul>



Tabel IV.24  
Bidang Prasarana Wilayah (5)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Konsultasi Regional OP Prasarana Sumber Daya Air Tahun 2017
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internalisasi OP SDA dalam dokumen perencanaan/RPJMD</li> <li>2. Modernisasi Pengairan</li> <li>3. Single Management/Kolaborasi OP SDA berbasis Tematik</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas</li> <li>3. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR</li> <li>4. Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian</li> <li>5. Dirjen Pengendalian DAS dan HL Kementerian LHK</li> <li>5. Asdep Infrastruktur SDA Kemenko Perekonomian</li> </ol>
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait konsultasi regional operasi dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air Tahun 2017
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan kegiatan strategis untuk mendukung ketahanan pangan (<i>food security</i>) &amp; Ketahanan Air Nasional untuk mencapai target surplus 10 juta ton beras.</li> <li>• Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah sampai tahun 2019 menargetkan pembangunan 1 juta Ha irigasi baru dan merehabilitasi 3 juta ha irigasi. Saat ini secara nasional total luas Daerah Irigasi 9.136.028 Ha dengan luas sawah 8.132.344 Ha dengan luas sawah beririgasi teknis 4.417.582 Ha (data ini belum didukung dengan peta geospasial).</li> <li>• Dalam mencapai pemenuhan target tersebut, belum dilakukan pendekatan single management dalam pengelolaan SDA untuk mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar membuat satu peta lahan sawa beririgasi berbasis <i>One Map Policy</i> sebagai dasar untuk pengelolaan SDA melalui pendekatan single management.



NO	ITEM	DESKRIPSI
		Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Rapat Konsultasi Daerah OP Prasarana SDA Tahun 2018.

Tabel IV.25  
Bidang Prasarana Wilayah (6)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Capacity Building Water Resources Management
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Brantas</li> <li>2. Pendayagunaan Sumber Daya Air Lingkup Wilayah Sungai Brantas</li> <li>3. Tantangan dan Solusi Pengendalian Banjir Kota Surabaya</li> <li>4. Pengendalian Banjir Kota Samarinda</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BWS Kalimantan III, Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>2. SNVT PJPA</li> <li>3. SNVT PJSA</li> <li>4. PPK Perencanaan dan Program</li> <li>5. PPK Tatalaksana</li> <li>6. PPK Aset dan Bendungan</li> </ol>
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan berupa konsep pengendalian banjir di Kota Surabaya dan Samarinda
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan gambaran mengenai pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Brantas, secara khusus di Kota Surabaya</li> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas dilaksanakan dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Perusahaan Umum (Perum Jasa) Jasa Tirta 1</li> <li>• Dalam pelaksanaan tugas, koordinasi antara Perum Jasa Tirta dengan Lembaga instansi pemerintah, masyarakat dan pengusaha diwadahi melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA)</li> </ul>



NO	ITEM	DESKRIPSI
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep pengendalian banjir di Kota Surabaya adalah dengan upaya Sistem Pengelolaan Drainase yang terpadu dengan konservasi sumber daya air.</li> <li>Kunci utama kesuksesan pengendalian banjir Kota Surabaya adalah pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditetapkan secara konsisten dan penuh komitmen.</li> </ul>

Tabel IV.26  
Bidang Prasarana Wilayah (7)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Sosialisasi Pola Wilayah Sungai Mahakam dan Koordinasi Revitalisasi GN-KPA Provinsi Kalimantan Timur
2	Materi Koordinasi	Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Mahakam
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	BWS Kalimantan III, Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait revitalisasi GN-KPA
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Dokumen pola pengelolaan SDA WS. Mahakam merupakan arahan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, pelaksanaan sistem informasi, serta pemberdayaan masyarakat Sumber Daya Air; Dengan mempertimbangkan berbagai isu baik skala lokal dan nasional, analisis terhadap berbagai data, telah diidentifikasi potensi rerata air serta upaya penyediaan air pada 3 (tiga) skenario ekonomi;
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Kesepakatan terhadap penyempurnaan serta saran masukan akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan.

Tabel IV.27  
Bidang Prasarana Wilayah (8)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Sulawesi Utara – Gorontalo – Sulawesi Tengah – Kalimantan Timur – Kalimantan Utara
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Perpres No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Sulawesi Utara – Gorontalo – Sulawesi Tengah – Kalimantan Timur – Kalimantan Utara</li> <li>2. Muatan RTR Kawasan Perbatasan Negara Sulut – Gorontalo – Sulteng – Kaltim – Kaltara</li> <li>3. Kedudukan RTR Kawasan Perbatasan Kawasan Perbatasan Negara Sulut – Gorontalo – Sulteng – Kaltim – Kaltara dalam Konstelasi Peraturan Perundangan</li> <li>4. Rencana Aksi RTR Kawasan Perbatasan Kawasan Perbatasan Negara Sulut – Gorontalo – Sulteng – Kaltim – Kaltara dalam Konstelasi Peraturan Perundangan</li> <li>5. Koordinasi dan Kelembagaan dalam RTR Kawasan Perbatasan Negara Sulut – Gorontalo – Sulteng – Kaltim – Kaltara</li> <li>6. Proses Sertifikasi Tanah di Kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar</li> <li>7. Kebijakan Perencanaan Ruang Laut di Pulau-Pulau Kecil Terluar</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN</li> <li>2. Sekretariat Kabinet</li> <li>3. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan</li> <li>4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>5. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ol>
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait sosialisasi peraturan perundang-undangan kawasan perbatasan negara
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<p>Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan kawasan fungsi dan pertahanan dan keamanan negara</li> </ul>



NO	ITEM	DESKRIPSI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan kawasan berfungsi lindung perbatasan negara yang lestari</li> <li>- Mewujudkan kawasan budidaya perbatasan yang mandiri dan berdaya saing</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<p>Perpes No. 11 Tahun 2017 akan mendukung pertahanan dan keamanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segi ekonomi, meliputi perdagangan sebagai pusat-pusat produksi ekspor dan pintu ekspor-impor</li> <li>- Segi lingkungan hidup, meliputi eksosistem penting/rawan bencana dan eksistensi garis batas (sempadan danau); dan</li> <li>- Aspek sosial, meliputi kekerabatan masyarakat adat dan ketersediaan prasarana dasar</li> </ul>

Tabel IV.28  
Bidang Prasarana Wilayah (9)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Workshop Bimbingan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah</li> <li>2. Kebijakan dan Peran BIG dalam Percepatan Penyelesaian Peta Rencana Tata Ruang</li> <li>3. Sosialisasi Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang</li> <li>4. Sosialisasi Pedoman Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang</li> <li>5. Sosialisasi Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Daerah</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>7. Badan Informasi Geospasial</li> <li>8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN</li> </ol>
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana tata ruang harus menjadi PANGlima dalam pelaksanaan program-program pembangunan, baik di pusat maupun daerah</li> </ul>



NO	ITEM	DESKRIPSI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peninjauan kembali dan revisi RTR merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan rencana tata ruang yang lebih baik dan berkualitas</li> <li>• Dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen RTR, Kebijakan Satu Peta merupakan solusi sempurna untuk mengatasi masalah tumpang tindih izin penggunaan lahan</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Ranperda RTR Daerah, agar dilakukan dengan benar-benar berkualitas (melaksanakan Konsultasi Publik minimal 2 kali) agar RTR ini bisa menjadi acuan selama 20 tahun, RTR sebagai panglima acuan seluruh sektor.</li> <li>• Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan jika terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan undang-undang</li> <li>• Perlunya dilakukan Bimtek dan Sosialisasi perlu dilaksanakan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi dan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat</li> </ul>

Tabel IV.29  
Bidang Prasarana Wilayah (10)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substansi Perda RTRW Kaltim 2016 – 2036</li> <li>2. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota (Permen ATR No. 37 Tahun 2016)</li> <li>3. Tata Cara Konsultasi dan Pengeluaran Persetujuan Peta Dasar untuk Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang</li> <li>4. Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Tata Ruang (PP No. 46 Tahun 2016)</li> </ol>





NO	ITEM	DESKRIPSI
		5. Pedoman Penyusunan Peninjauan Kembali (PK) dan Revisi Rencana Tata Ruang
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 2. Badan Informasi Geospasial 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan RTR KSP Kalimantan Timur memiliki beberapa kendala diantaranya deliniasi kawasan masih bersifat indikatif dan belum tersedianya peta dasar skala 1 : 25.000.</li> <li>Adanya perbedaan luas antara RTRWP dan RTRWK/K sehingga diperlukan satu referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan.</li> <li>Pengukuran kinerja penyelenggaraan penataan ruang pemerintah Kabupaten/Kota dan bertujuan agar penyelenggaraan penataan ruang di tingkat Kabupaten/Kota berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan RTR KSP dan KSK agar mengacu pada Permen ATR No. 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan KSP dan KSK.</li> <li>Dalam pelaksanaan pengawasan teknis Tahun 2017, perlu melakukan <i>upload</i> dokumen berupa Persub Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan penelitian dan pengembangan penataan ruang.</li> </ul>

Tabel IV.30  
Bidang Prasarana Wilayah (11)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Kebijakan Pertahanan Negara
2	Materi Koordinasi	1. Kebijakan Pertahanan Negara menghadapi Potensi Ancaman Nonmiliter 2. Persiapan Pertahanan Sejak Dini melalui Bela Negara



NO	ITEM	DESKRIPSI
		3. Peran PTP Kemhan di Daerah dalam Mendukung Kebijakan Pertahanan Negara
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Pertahanan RI
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait kebijakan pertahanan negara
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Salah satu pilar pertahanan negara yang penting untuk diperkuat di Indonesia adalah Sumber Daya Manusia, yang salah satunya dilakukan melalui gerakan bela negara sejak dini secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menciptakan rakyat yang memiliki jiwa militansi, patriotism, dan kecintaan terhadap tanah air, serta meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman militer dan non militer.</li> <li>Guna mewujudkan pertahanan negara yang handal dan tangguh diperlukan Konsep Strategi Pertahanan Rakyat Semesta dengan komponen utama : TNI yang hebat dengan alutsista yang kuat, rakyat yang berjiwa militan, rela berkorban dan memiliki patriotisme tinggi, dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung hankam yang berkualitas.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai elemen bangsa harus terus berupaya membangun kapasitas pertahanan non-militer yang integratif sesuai dengan lingkup kewenangannya.</li> <li>Diperlukan integrasi dan kesungguhan dari TNI – POLRI – Pemerintah – Swasta – Masyarakat guna mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangkal ancaman-ancaman non militer.</li> <li>Pemerintah berperan nyata dalam hal pengambilan kebijakan regulasi daerah, kebijakan pembangunan, kebijakan anggaran dan kebijakan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>Penataan ruang wilayah perbatasan harus terintegrasi antara RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.</li> <li>Membangun sistem informasi pertahanan negara berbasis spasial dengan memanfaatkan teknologi citra satelit.</li> </ul>

Tabel IV.31  
Bidang Prasarana Wilayah (12)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rakor BKPRD se-Kalimantan Timur
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran BKPRD dalam Rangka Koordinasi Penataan Ruang Pasca ditetapkannya PP Nomor 18 Tahun 2016</li> <li>2. Optimalisasi Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Permasalahannya</li> <li>3. Permasalahan dan Strategi terkait Perencanaan RTR KSP, KSK, dan RDTR Kab/Kota</li> <li>4. Kesesuaian RTRW Provinsi terhadap Peraturan/Kebijakan Nasional dan RTRW Kab/Kota dan Permasalahannya</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN</li> </ol>
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan yaitu penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota serta pengendalian pemanfaatan ruang dan permasalahannya
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian penataan ruang seharusnya bukan bergerak pasca perencanaan penataan ruang, tapi harus masuk dari awal bersamaan dengan perencanaan</li> <li>• Penyusunan RDTR oleh Kabupaten/Kota terkendala pada ketersediaan peta dasar yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)</li> <li>• Belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang yaitu masalah alih fungsi, konflik kepentingan dan munculnya slam-slam area</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi akan melakukan audit pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota</li> <li>• Provinsi akan melakukan penilaian tentang kinerja penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Pengawasan Teknis (SIWASTEK) sebagai bahan penilaian panji pelaksanaan penataan ruang di tingkat Kabupaten/Kota</li> </ul>

Tabel IV.32  
Bidang Prasarana Wilayah (13)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun 2017
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengintegrasian Pendaftaran Tanah dalam Perencanaan Tata Ruang</li> <li>2. Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Laut dalam Penyusunan RZWP3K</li> <li>3. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Timur dan Pandangan terhadap Kelembagaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kedepan</li> <li>4. Koordinasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang di Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Pandangan terhadap Kelembagaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kedepan</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN</li> <li>3. Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>4. Badan Informasi Geospasial (BIG)</li> <li>5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> </ol>
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan yaitu penyelenggaraan penataan ruang di daerah dan kelembagaan penataan ruang daerah
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<p>Hasil Rumusan Sidang Komisi I : Perencanaan Tata Ruang</p> <p>Hasil Rumusan Sidang Komisi II : Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diharapkan BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih proaktif dalam konsolidasi penyesuaian antara RTRWP dan RTRWK</li> <li>• Kabupaten/Kota wajib menyusun RDTR setelah menetapkan Perda RTRWnya guna menindaklanjuti PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai dasar arah pembangunan 20 tahun kedepan</li> <li>• Tata ruang sebagai Panglima Pembangunan, karenanya peningkatan peran Satpol PP, PPNS bidang penataan ruang, serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang lebih dilaksanakan secara konsisten</li> </ul>

Tabel IV.33  
Bidang Prasarana Wilayah (14)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Sarasehan Nasional Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
2	Materi Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarasehan Nasional Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)</li> <li>2. Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan</li> <li>3. Tindak Lanjut Implementasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur</li> <li>4. Arah Tata Ruang</li> </ol>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait KPPN di Kaltim serta program/kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur Kaltim
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesepakatan Bersama Komitmen Pengembangan KPPN</li> <li>• Telah disepakati program pengembangan infrastruktur PUPR dan Non PUPR di KPPN</li> <li>• Telah disepakati bentuk dukungan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah baik dari tingkat pusat maupun daerah dalam pelaksanaan program-program pengembangan kawasan</li> <li>• Telah disepakati kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan <i>readiness criteria</i> pada program yang akan dilaksanakan pemerintah pusat</li> <li>• Tercapainya komitmen bersama antar seluruh sektor terkait, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten dalam pelaksanaan program pengembangan KPPN yang berkelanjutan dan terpadu</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Rekomendasi Pemerintah Pusat untuk pengembangan KPPN di kabupaten, yaitu agar lokasi kawasan perdesaan yang ditetapkan Bupati sebagai KPPN dapat didorong untuk ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dalam proses penetapan/revisi RTRW Kabupaten dan masterplan KPPN yang telah disusun, diarahkan untuk menjadi materi teknis penyusunan RRTR/RDTR perdesaan.

### c. Subbid. Prasarana Perumahan dan Pemukiman

Tabel IV.34  
Bidang Prasarana Wilayah (1)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	A. Rapat Penyusunan PTMP dan DED TPA Buluminung (Zona II) Kabupaten Penajam Paser Utara; B. Rapat Penyusunan DED Drainase Lingkungan Permukiman Kabupaten Paser; C. Rapat Penyusunan DED Drainase Lingkungan Permukiman Kabupaten Penajam Paser Utara.
2	Materi Koordinasi	A. Perencanaan teknis manajemen persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Penajam Paser Utara; B. Perencanaan DED Drainase Lingkungan Permukiman untuk 3 zona di Kabupaten Paser, yaitu: Zona I meliputi kawasan Jl. Amal, zona II meliputi kawasan Gang Padat Karya serta zona III seputar kawasan Gang Balai yang semua lokasi berada di Kota Tanah Paser; C. Perencanaan DED Drainase Lingkungan Permukiman pada saluran sekunder dan tersier Kota Penajam.
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Satker PSPLP Prov. Kaltim
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	3 Kegiatan
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya dokumen DED sebagai dasar perencanaan teknis pembangunan;</li> <li>• Teridentifikasi informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan;</li> <li>• Mengetahui kemajuan dalam rencana persiapan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama tahun 2017.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Pembangunan fisik TPA Buluminung II, serta pembangunan Drainase Lingkungan di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara diusulkan untuk dapat terealisasi pada tahun 2018 melalui anggaran APBN Kementerian PUPR.



Tabel IV.35  
Bidang Prasarana Wilayah (2)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	<p>A. Rapat Koordinasi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ke-3;</p> <p>B. Kick-Off Meeting Program PPSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017;</p> <p>C. Konsolidasi Review Dokumen SSK Tahun 2017 (Kabupaten Mahakam Ulu);</p> <p>D. Kegiatan Penjaminan Kualitas Dokumen Pemutakhiran SSK (Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara);</p> <p>E. Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Program PPSP Tahun 2018.</p>
2	Materi Koordinasi	<p>A. Pencapaian Target Nasional Universal Access 100-0-100 yang tercantum di dalam RPJMN 2015-2019;</p> <p>B. Penjaminan Kualitas Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara;</p> <p>C. Konsolidasi Review Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Mahakam Ulu;</p> <p>D. Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>E. Penyusunan Rencana Kegiatan Program PPSP Tahun 2018.</p>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, Satker PSPLP Prov. Kaltim.
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBN dan APBD Provinsi
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Kegiatan yang dikoordinasikan. terkait Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Provinsi Kalimantan Timur.
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercapainya target nasional Universal Access 100-0-100 yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019.</li> <li>• Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);</li> <li>• Teridentifikasi informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul selama</li> </ul>



NO	ITEM	DESKRIPSI
		<p>pelaksanaan penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui capaian pelaksanaan Program PPSP di Provinsi Kalimantan Timur.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<p>A. Segera membentuk POKJA AMPL/Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sesuai dengan OPD dan SOTK Baru;</p> <p>B. POKJA Provinsi melaksanakan Tupoksi sesuai dengan SE Mendagri No. 660/4919/SJ tahun 2012 (Koordinasi, Advokasi, Advisori, Fasilitas, Supervisi dan Sinkronisasi);</p> <p>C. Menyelenggarakan <i>Kick-Off Meeting</i> Provinsi sebagai indikator awal pelaksanaan PPSP;</p> <p>D. Melakukan penjaminan kualitas dokumen Pemutakhiran SSK;</p> <p>E. Melaksanakan Pra Lokakarya dan Lokakarya MPS Tingkat Provinsi;</p> <p>B. Pemerintah Pusat melalui BAPPENAS dan Kementerian PUPR agar senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan PPSP TA 2017 baik terhadap kegiatan fisik maupun non-fisik yang berada di Provinsi Kalimantan Timur minimal 3 bulan sekali;</p> <p>C. POKJA AMPL/Sanitasi kabupaten/kota wajib untuk melakukan updating data SSK melalui sistem Nawasis secara online;</p> <p>D. Perlu penyeragaman data layanan eksisting sanitasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota maksimal bulan Agustus 2017;</p> <p>E. Perlu kesepakatan target <i>Universal Access</i> untuk masing-masing kabupaten/kota;</p> <p>F. Provinsi, kabupaten/kota mengawal pencapaian <i>Universal Access</i> pada tahun 2019 dengan memasukkan pembangunan sanitasi dalam program prioritas di RPJMD;</p> <p>G. POKJA AMPL kabupaten/kota masih perlu melakukan perbaikan terhadap substansi dokumen sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Pedoman Penyusunan SSK Tahun 2017;</p> <p>H. <i>Kick-Off Meeting</i> tingkat provinsi dilaksanakan di Kabupaten Berau tahun 2018;</p> <p>I. <i>Workshop On-Going Review</i> Implementasi Program PPSP;</p>





NO	ITEM	DESKRIPSI
		<p>J. <i>Road Show</i> Advokasi PPSP POKJA Provinsi ke kabupaten/kota;</p> <p>K. Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi ke 10 kabupaten/kota;</p> <p>L. Melakukan pendampingan eksternalisasi kabupaten ke tingkat pusat.</p>

Tabel IV.36  
Bidang Prasarana Wilayah (3)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Nasional Program PAMSIMAS Provinsi Kalimantan Timur
2	Materi Koordinasi	<p>A. Peran Pemerintah Provinsi dalam mendukung Pencapaian Akses Universal Tahun 2019 (100-0-100);</p> <p>B. Percepatan akses air minum dan sanitasi melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);</p> <p>C. Pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan realisasi APBD bidang AMPL untuk mengukur kemajuan pencapaian akses universal air minum aman dan sanitasi layak.</p>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Satker PSPAM Prov. Kaltim.
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBN
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Kegiatan yang dikoordinasikan terkait Program PAMSIMAS di Provinsi Kalimantan Timur.
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasi informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan Program PAMSIMAS di Kabupaten/Kota;</li> <li>• Mengetahui capaian pelaksanaan Program PAMSIMAS di Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>• Tercapainya target nasional Universal Access 100-0-100 yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	A. menyusun dokumen rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan (RAD AMPL) yang diinternalisasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD & RPJMD). Minimal 70% dari jumlah seluruh



NO	ITEM	DESKRIPSI
		<p>kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki RAD AMPL;</p> <p>B. Tim kabupaten harus dapat memastikan kesiapan dokumen pencairan dana tahap I sambil menunggu proses penerbitan DIPA revisi, diantaranya: SK penerima manfaat oleh PPK, SK penerima manfaat oleh Kasatker, PKS, kwitansi dan lampirannya;</p> <p>C. Menyusun RKTL kegiatan pelatihan tingkat kabupaten sampai dengan tahun 2019 dengan mengacu pada KAK ROMS;</p> <p>D. Sosialisasi PHBS dan stop BABS, dengan memanfaatkan alokasi anggaran baik APBD maupun DAK Non Fisik melalui BOK di masing-masing Puskesmas;</p> <p>E. Pemerintah Daerah menyusun laporan periodik mengenai alokasi dan realisasi anggaran AMPL bersumber APBD, DAK, HAMP dan dilaporkan kepada Ditjen Bina Bangda serta tembusan ke dalam SIM PAMSIMAS;</p> <p>F. Mendorong terjadinya integrasi Perencanaan Jangka Menengah Program Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (PJM ProAKSI) kedalam RPJM Desa.</p>

Tabel IV.37  
Bidang Prasarana Wilayah (4)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Konsolidasi Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya.
2	Materi Koordinasi	Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya melalui pembangunan database bidang Cipta Karya di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan arahan SE Menteri PAN-RB No.5/2014 tentang Revitalisasi Unit Data dan Informasi Kementerian dan Lembaga.
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian PUPR, Satker RANDAL Prov. Kaltim.
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBN
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Kegiatan
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Terwujudnya Data Bidang Cipta Karya yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat



NO	ITEM	DESKRIPSI
		diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah.
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengisian instrumen data Bidang Cipta Karya sesuai dengan format yang telah distandarisasi.

Tabel IV.38  
Bidang Prasarana Wilayah (5)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	A. Rapat Konsultasi dan Sinkronisasi Program SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur; B. FGD Penyelenggaraan Kegiatan Revisi Pedoman Teknis Umum Rumah Sederhana Sehat (RSS); C. Rapat Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan Tim Koordinasi dan Tim Teknis di Provinsi Kalimantan Timur Ke-I; D. Rapat Sinkronisasi Program Bidang Perumahan dan Permukiman.
2	Materi Koordinasi	A. Sinkronisasi perencanaan penyediaan perumahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2017 B. Pemantapan lokasi dalam rangka pelaksanaan program penyediaan perumahan tahun 2017 di kabupaten/kota C. Penentuan kriteria penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) D. Penyaringan usulan program dan kegiatan penyediaan perumahan tahun 2018
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Satker SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Kaltim.
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBN
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	4 Kegiatan yang dikoordinasikan meliputi: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pembangunan rumah susun dan rumah khusus, pemeliharaan rumah susun dan pembangunan PSU yang dibangun pengembang untuk MBR di Provinsi Kalimantan Timur.



NO	ITEM	DESKRIPSI
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasi informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan;</li> <li>• Mengetahui capaian penurunan angka backlog perumahan di Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>• Terwujudnya sinkronisasi program penyediaan perumahan di kabupaten/kota;</li> <li>• Mengetahui kemajuan dalam pelaksanaan pembangunan penyediaan perumahan selama tahun 2017.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<p>A. mengevaluasi usulan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan POKJA PKP Provinsi;</p> <p>B. Mengurangi angka backlog perumahan;</p> <p>C. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pembangunan rumah susun dan rumah khusus, pemeliharaan rumah susun dan pembangunan PSU yang dibangun pengembang untuk MBR di Provinsi Kalimantan Timur.</p>

Tabel IV.39  
Bidang Prasarana Wilayah (6)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	<p>A. Rapat Pemahaman Urgensi dan Penyusunan RP3KP dan Forum Sinkronisasi Pendataan Provinsi, Ratek RP3KP;</p> <p>B. Rapat Koordinasi POKJA PKP dalam Pembahasan Teknis RP3KP.</p>
2	Materi Koordinasi	<p>A. Peran POKJA PKP Kaltim dalam Mengawal Pembangunan PKP di Kaltim;</p> <p>B. Peningkatan Pemberdayaan dan Peran POKJA PKP Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Review Dokumen RP3KP Kabupaten/Kota;</p> <p>C. Pembangunan Basis Data PKP dan Pendataan Program Satu Juta Rumah 2017.</p>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Kaltim.
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBN dan APBD Provinsi
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan



NO	ITEM	DESKRIPSI
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasi informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kegiatan;</li> <li>• Terbentuknya kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota;</li> <li>• Mengetahui kemajuan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Dokumen RP3KP;</li> <li>• Terwujudnya sinkronisasi basis pendataan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Timur.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<p>A. Pemerintah daerah membentuk kelembagaan POKJA PKP Kabupaten/Kota;</p> <p>B. Melakukan penyusunan Dokumen RP3KP Kabupaten/Kota;</p> <p>C. Menyusun basis data penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pembiayaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota;</p> <p>D. Menyusun draft data spasial rumah khusus-rumah susun Kabupaten/Kota;</p> <p>E. Menyusun rekapitulasi untuk laporan bulanan Satu Juta Rumah.</p>

Tabel IV.40  
Bidang Prasarana Wilayah (7)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh di 30 Kabupaten/Kota Prioritas
2	Materi Koordinasi	Strategi Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh di 30 Kabupaten/Kota Prioritas
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian PUPR, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Kaltim
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBN
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Kegiatan
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersampainya pemahaman tentang urgensi percepatan penanganan kumuh di 30 kabupaten/kota.</li> <li>• Tersosialisasinya 30 kabupaten/kota prioritas yang menjadi fokus penanganan</li> </ul>



NO	ITEM	DESKRIPSI
		kumuh dalam rangka percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkoordinasinya seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan di 30 kabupaten/kota prioritas.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Hasil kegiatan akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang akan ditandatangani bersamaan dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Kepala Daerah pada acara puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tanggal 30 Oktober 2017, sebagai bentuk komitmen pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti Penanganan Permukiman Kumuh di 30 Kabupaten/Kota Prioritas.

Tabel IV.41  
Bidang Prasarana Wilayah (8)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Kewenangan Pemerintah Daerah
2	Materi Koordinasi	A. Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan kewenangan Daerah; B. Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan dan Kawasan Permukiman; C. Program Legislasi Daerah dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah; D. Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman yang perlu tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian PUPR
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBN
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Kegiatan



NO	ITEM	DESKRIPSI
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>• Terkoordinasinya seluruh pemangku kepentingan terkait dalam Kegiatan Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Kewenangan Pemerintah Daerah.</li> </ul>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Provinsi Kalimantan Timur membuat surat Gubernur terkait Bendungan Marangkayu yang merupakan kewenangan Provinsi, namun menurut kewenangan UU Nomor 23 Tahun 2014, lebih sesuai untuk dibiayai APBN.

Tabel IV.42  
Bidang Prasarana Wilayah (9)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah Tertinggal
2	Materi Koordinasi	Sosialisasi Rancangan Rencana Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Kementerian Dalam Negeri
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBN
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Kegiatan
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Tersosialisasikannya SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah Tertinggal
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, yaitu: Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

### 3) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Tabel IV.43

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (1)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Forum Kerjasama Pemerintah Prov. Kaltim dengan Universitas Mulawarman dalam mengevaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
2	Materi Koordinasi	Evaluasi Tahun Keempat RJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Universitas Mulawarman
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 pada DPA Bappeda Prov. Kaltim dalam kegiatan Pengendalian dan Evaluasi dengan Jumlah Anggaran Rp.437.200.000,-
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	<p>Terdiri 8 Kegiatan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Laporan Pendahuluan</li> <li>2. Konsultasi dan Koordinasi ke Pusat dan ke Daerah</li> <li>3. Permintaan Data Sekunder</li> <li>4. Pengolahan dan Menganalisa Data</li> <li>5. Penyusunan Laporan Antara</li> <li>6. Konsultasi dan Konfirmasi Progres Hasil Evaluasi</li> <li>7. Konsiyering Penyusunan Laporan Akhir</li> <li>8. Penyusunan Laporan Akhir</li> </ol>
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	<p>Hasil : Laporan Evaluasi Hasil Tahun Keempat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018</p> <p>Manfaat : Menjadi Bahan Evaluasi dan masukan bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah tahun berikutnya</p>
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong Pemerintah Daerah dan SKPD untuk memiliki data informasi pembangunan yang lengkap dan akurat</li> <li>2. Melakukan komunikasi yang lebih intens secara vertikal maupun horisontal</li> <li>3. Review dan penyusunan Program-program pembangunan beserta indikator dalam RPJMD 2013-2018 dengan RPJMN 2014-2019</li> <li>4. Optimalisasi partisipasi para pihak/pemangku kepentingan (Stakeholders) baik dari unsur swasta maupun masyarakat</li> </ol>





NO	ITEM	DESKRIPSI
		5. Mengaklarkan dan mengejar ketercapaian target pembangunan

Tabel IV.44

## Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (3)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Triwulan terkait pelaporan pelaksanaan APBN di Provinsi Kalimantan Timur
2	Materi Koordinasi	Realisasi Keuangan dan fisik serta kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan APBN
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Semua Instansi Vertikal dan SKPD pelaksana Program/Kegiatan bersumber Dana APBN
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBD Provinsi
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	4 Kali Koordinasi (per Triwulan)
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Hasil : Pelaporan Evaluasi Manfaat : Sebagai bahan Penyusunan Program/Kegiatan Tahun mendatang
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	Rapat Koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian terkait di tingkat pusat

Tabel IV.45

## Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (4)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	Rapat Koordinasi Sekretariat FKRP2RK di Kalimantan Tengah
2	Materi Koordinasi	Materi Rakor yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Usulan FKRP2RK tahun 2017 terhadap DIPA 2017</li> <li>• Rencana Kerja FKRP2RK tahun 2017</li> <li>• Persiapan Pertemuan Gubernur se Kalimantan</li> </ul>
3	Instansi Vertikal yang Terlibat	Bappeda Provinsi se Kalimantan
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	Sumber Dana APBD Prov. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk Koordinasi sebesar Rp.
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Kegiatan yang dikoordinasikan terkait Evaluasi dan Rencana Kerja Forum Regional Kalimantan Tahun 2015



NO	ITEM	DESKRIPSI
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat FKRP2RK Tahun 2015 serta sinkronisasi usulan program/kegiatan se Kalimantan dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Regional Kalimantan
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai bahan Usulan Musrenbang Nasional untuk Rencana Kerja Pemerintah Pusat</li> <li>Sebagai bahan sinkronisasi program/kegiatan antara Renja Kementerian/Lembaga dengan Renja SKPD</li> </ul>

#### 4) UPTB Pusat Data dan Informasi

Tabel IV.46  
UPTB Pusat Data dan Informasi (1)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Forum Koordinasi	a. Penyusunan Laporan Triwulanan Perekonomian Kaltim Tahun 2016 b. Evaluasi Sistem Informasi Data (SIDATA) Pembangunan Kaltim c. Evaluasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
2	Materi Koordinasi	a. Pengumpulan Data dan Penyusunan Dokumen Laporan Triwulan b. Memberikan Evaluasi dan Klarifikasi Data SIDATA c. Memberikan evaluasi dan klarifikasi data Kabupaten/Kota serta OPD Prov. kaltim
3	Instansi Pusat Yang Terlibat	a. BPS Provinsi Kaltim b. BPS, BKKBN, Polda, BPN, Kementerian Hukum dan HAM, SKPD Prov. Kaltim c. OPD Provinsi dan Kab/Kota Se Kalimantan
4	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBD Tahun 2017
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	a. Empat b. Dua c. Dua
6	Hasil dan Manfaat Koordinasi	a. Tersedianya informasi perkembangan angka PDRB Kaltim per Triwulan dan beberapa indikator Ekonomi dan Sosial lainnya



NO	ITEM	DESKRIPSI
		b. Tersedianya data Prov Kaltim yang cepat, akurat dan ter update c. Tersedianya data Kabupaten/Kota se-Kaltim
7	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	a. Penyusunan Dokumen Laporan Triwulanan Perekonomian b. Data cepat, tepat dan akurat sehingga ke depan diperlukan Update Data dari masing-masing SKPD dan Instansi Vertikal c. Data cepat, tepat dan akurat sehingga ke depan diperlukan Update Data dari masing-masing OPD dan Kab/Kota Se-Kaltim

Tabel IV.47  
UPTB Pusat Data dan Informasi (2)

NO	ITEM	DESKRIPSI
1.	Forum Koordinasi	Jaringan Informasi Geospasial Daerah
2.	Materi Koordinasi	a. Pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur dan Teknologi, Standar Data Geospasial, Sumber Daya Manusia) b. Pengelolaan Data Raster Geospasial (Citra Satelit). c. Pengembangan Perencanaan Berbasis Spasial (Spatial Planning) di Daerah.
3.	Instansi Pusat yang Terlibat	a. Badan Informasi Geospasial b. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional a. Kementerian PPN/BAPPENAS
4.	Sumber dan Jumlah Anggaran	APBD Provinsi Kalimantan Timur TA. 2017 Rp. _____
5.	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan	Lebih dari 10 Kali
6.	Hasil dan Manfaat Koordinasi	a. Pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Daerah b. Perjanjian Kerja Sama di bidang Penyediaan Data Geospasial (Citra Satelit) dengan LAPAN

NO	ITEM	DESKRIPSI
		c. Penyamaan Persepsi dalam Rencana Pengembangan Perencanaan Berbasis Spasial
7.	Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	a. Pemutakhiran Geoportal b. Standarisasi Data dan Informasi Geospasial c. Penambahan Kuantitas Publikasi Informasi Geospasial d. Penyediaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi e. Penyusunan Konsep Awal Perencanaan Berbasis Spasial Kalimantan Timur

#### b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2017 yang terkait dengan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah, belum maksimalnya sinergitas berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan Kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan Timur.

Solusi terhadap permasalahan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan berbagai stakeholders di Kalimantan Timur, di antaranya dengan melakukan rapat teknis yang melibatkan semua stakeholder yang terkait secara kontinyu. Selain itu, seluruh stakeholder harus meningkatkan kerjasama dalam mendukung menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan akuntabel untuk mencapai Kalimantan Timur Maju 2018 serta sesuai kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BAPPEDA Provinsi Kaltim Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai salah satu SKPD di lingkup pemerintah Prov. Kaltim akan menjadi bahan bagi penyusunan LPPD Pemerintah Prov. Kaltim Tahun 2017. Selanjutnya laporan ini disampaikan kepada Pemerintah (Presiden RI), DPRD Prov. Kaltim dan masyarakat, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Pemerintah Prov. Kaltim Tahun 2017.

Tim penyusun menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, untuk itu saran perbaikan sangat kami harapkan, baik berkenaan dengan penyusunan laporan maupun kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan *good governance* dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Akhirnya, atas kerja sama dan dukungan semua pihak yang telah membantu diucapkan terima kasih.